

PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya kita tak henti-hentinya diberikan banyak nikmat, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Abdi Negara maupun Abdi Masyarakat yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan kemasyarakatan. Solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya yang selalu konsisten terhadap ajarannya, amin.

Pada prinsipnya rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ini menyajikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, visi dan misi, strategi kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran. Strategi kebijakan program dan indikasi kegiatan adalah untuk mendukung proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang pada khususnya serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam ***Mewujudkan Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab.***

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pengembangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam satu materinya mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun sistem



perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP daerah, RPJM daerah dan Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahun.

Kami sadar bahwa Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ini jauh dari sempurna, namun inilah yang dapat kami susun sebagai bahan kebijakan Pemerintah dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyelenggara penanggulangan bencana. Selanjutnya kami mohon saran dan pendapat dari semua pihak sehingga kami dapat memperbaiki baik dari segi pembuatan atau penyusunan Renja maupun rencana kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun mendatang.

Bontang, Maret 2024

Kepala Pelaksana,

H. Usman. HM, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670615 200312 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR PENYUSUNAN.....	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI BPBD.....	2
1.4 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN.....	4
1.5 Keadaan Perlengkapan.....	6
1.6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD.....	7
BAB II.....	9
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	16
2.3.3 Tantangan.....	17
2.3.4 Peluang.....	20
BAB III.....	35
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.1.1 Visi Penanggulangan Bencana.....	35
3.1.2 Misi Penanggulangan Bencana.....	35
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana.....	36
3.1.4 Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	36
3.1.5 Strategi Penanggulangan Bencana.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	40
3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:.....	41
BAB IV.....	44



RINGKASAN PENDANAAN	44
BAB V	61
P E N U T U P.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Bencana terbagi oleh bermacam jenis, antara lain seperti bencana kebakaran, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, longsor, puting beliung dan lain-lain.

Kota Bontang yang jumlah penduduknya terus bertambah pesat seiring terus berkembangnya perekonomian, pendidikan, perdagangan dan jasa serta pariwisata tentu akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk sehingga ruang terbuka hijau akan semakin kecil, lahan pertanian akan berkurang, penataan perkotaan yang kurang baik, drainase yang tidak terpelihara dengan baik, sehingga kemungkinan bencana banjir akan terjadi dan potensi kebakaran diperkotaan (Kota Bontang) semakin besar. Ditambah dengan kondisi wilayah perbukitan antara daratan dan pantai, sehingga kemungkinan banjir dan tanah longsor akan terjadi sangat potensi sekali.

1.2 DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah :



1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, terdiri dari sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana

Kepala

Kepala BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang karena jabatannya (*Ex-Officio*)

Unsur Pengarah

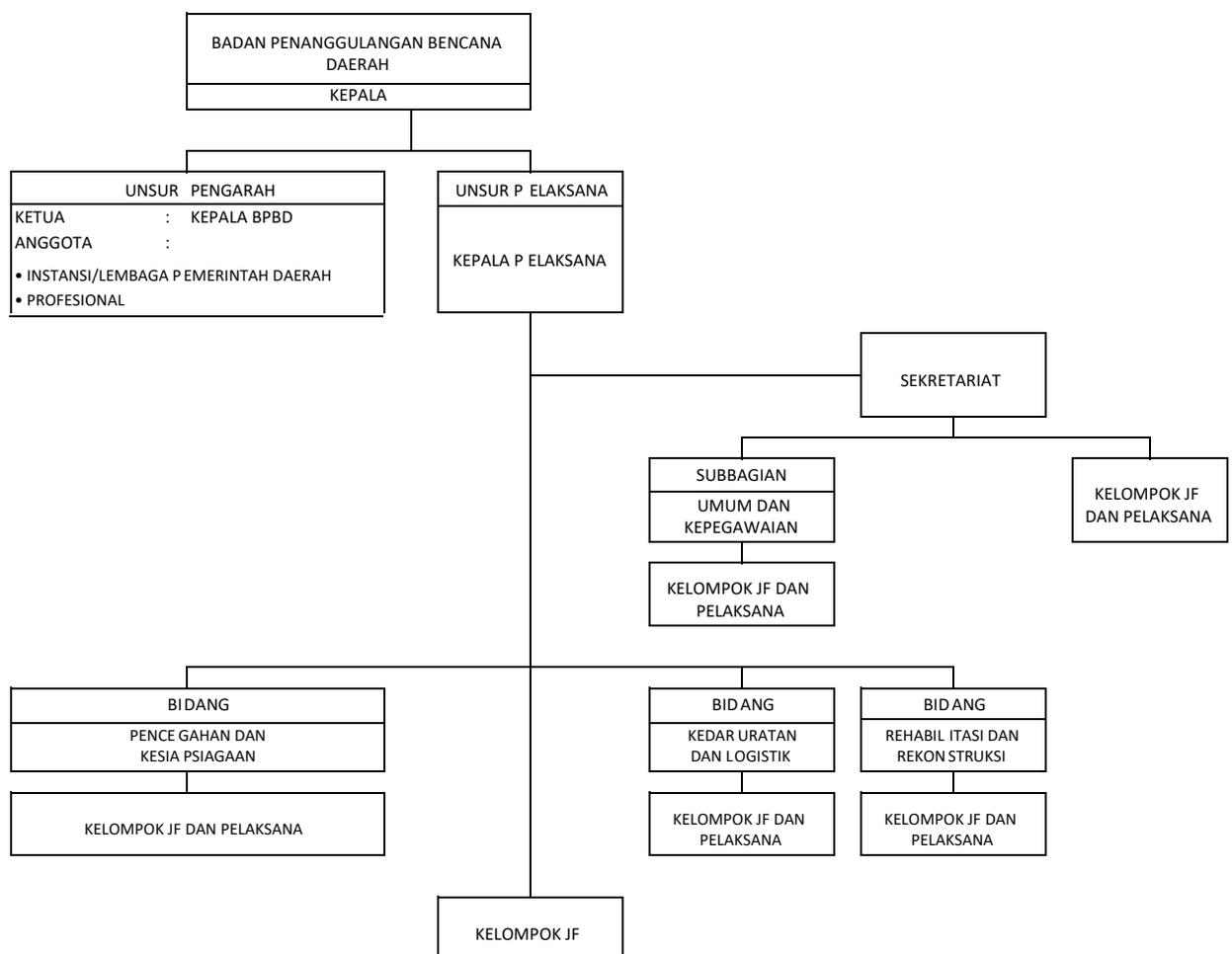
Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 11 (Sebelas) anggota.

Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Struktur organisasi BPBD Kota Bontang seperti tergambar pada Bagan Organisasi berikut:



1.4 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang didukung dengan keberadaan pegawai sejumlah 52 (Lima Puluh Satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I

Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	18
2	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK)	30
3	Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	4
JUMLAH		52

Berdasarkan jenjang pendidikan, kombinasi tingkat pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	2
2	Strata 1	7



3	SLTA	42
4	SLTP	1
JUMLAH		52

Berdasarkan tingkat kepangkatan, pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Tingkat Kepangkatan, Golongan dan Ruang

NO	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Pembina Tingkat I / IV.b	1
2	Pembina / IV.a	3
3	Penata Tk.I/ III.d	2
4	Penata Muda / III.a	4
5	Pengatur Tingkat I / II.d	6
6	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	1
7	Juru Tingkat I / I.c	1
8	PPPK	30
9	TKD	4
JUMLAH		52

1.5 Keadaan Perlengkapan

Sebagai unit kerja yang mengembang tugas dibidang penanggulangan bencana tentunya sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat, sarana dan prasarana dalam menunjang operasional dilapangan manjadi sangat penting mendapatkan perhatian, karena keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang menempati gedung kantor Ex. Kantor Satpol PP Kota Bontang yang sarana dan prasarana kelengkapan gedung belum cukup memadai. Utamanya belum mempunyai gudang yang cukup besar untuk menyimpan peralatan dan logistik penanggulangan bencana. Namun untuk sarana operasional sudah cukup memadai yang sebagian berasal dari hibah BNPB Pusat maupun dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Semuanya dapat dipergunakan untuk memaksimalkan daya kerja dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna membangun pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

Sarana dan Prasarana BPBD :

No.	Jenis Aset	Satuan	Volume
1.	Bangunan Gedung Kantor	unit	1
2.	Jalan dan Jembatan	unit	2
3.	Bangunan Air	unit	1
4.	Alat-Alat Besar (Water Treatmen, Mesin Pompa)	unit	51
5.	Alat-Alat Angkutan (Mobil Operasional, Mobil Rescue, Sepeda Motor, Speed Boat, Perahu Karet)	unit	68
6.	Alat Bengkel dan Alat Ukur (Mesin Potong, GPS)	Unit/buah	14



7.	Alat Kantor dan Rumah Tangga (Lemari, Kursi, Meja, Laptop, Printer, AC, Tabung dll)	Unit/buah	218
8.	Alat Studio dan Komunikasi (HT, Kamera, Infocus, Megapone, Radio SSB dll)	Unit/buah	109
9.	Alat Laboratorium (Alat selam, generator dll)	Unit/buah	10
10.	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan (Tabung Selam, Breating Aparatus dll)	Unit/buah	21
11.	Komputer	Unit/buah	56
12.	Alat Keselamatan Kerja	Unit/buah	93
13.	Peralatan Olah Raga	Buah/set	12
	Total		656

1.6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana juga pada Perda Koata Bontang Nomor 1 Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi 3 (tiga) tahapan :

1. Prabencana
2. Saat tanggap darurat, dan
3. Pascabencana

Dengan fungsi sebagai :

1. Pengoordinasian
2. Pengkomandoan, dan
3. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,



- penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BPBD mempunyai fungsi :

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun 2023 telah menganggarkan pembiayaan seluruh program dan kegiatan sebesar Rp. 10.299.795.439 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 8.514.806.291 atau 82,67%. Pada tahun berjalan terdapat 2 (dua) program yaitu program Penanggulangan Bencana dan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana memiliki 3 (tiga) kegiatan dengan 6 (enam) sub kegiatan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 6 (enam) dengan 13 (tiga belas) sub kegiatan.



Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:



Rencana Kerja BPBD Kota Bontang Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2026)		RKPD (tabel bantu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12= 8+9+10+11															
1 05 03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase pemenuhan SPM bidang penanggulangan bencana	100	persen	10,651,564,841	10%		1,095,962,550	100	Persen	756,529,245	18%		1,964,362,810	3%	300,559,390	0.5%	58,391,000	2%	75,012,745	26%	1,168,927,740	15%	1,602,890,875	
			Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	100	persen					100	Persen															
1 05 03 2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	persen	513,600,000	4%		20,800,000	100	persen	195,866,875	4%		19,107,570	1%	4,503,600				2%	11,028,500	3%	15,532,100		
1 05 03 2.01 01		Perencanaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	dokumen	868,125,000	1		-	1	Dokumen	185,066,875	1	dokumen	7,134,000	-	4,503,600	-						4,503,600		
1 05 03 2.01 02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	1500	orang	213,600,000	600	orang	20,800,000	180	Orang	10,800,000	161	orang	11,973,570	-					161	11,028,500	161	11,028,500		
1 05 03 2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	persen	10,078,532,903	2%		163,780,600	100	persen	187,050,000	18%		1,859,690,160	3%	263,083,300	0.4%	42,831,000	1%	48,581,400	25%	1,149,528,160	15%	1,504,023,860	
1 05 03 2.02 02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1500	orang	590,850,000	600	orang	43,425,000	1200	Orang	72,000,000	2,020	orang	1,468,798,280		243,993,700			1,074	36,180,000	871	925,595,160	1,945	1,205,768,860	
1 05 03 2.02 06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	50	kawasan	3,365,107,903	10	kawasan	120,355,600	10	kali	115,050,000	45	Kawasan	390,891,880	6	19,089,600		10	42,831,000	5	12,401,400	25	223,933,000	46	298,255,000
			Jumlah Bangunan yang diinspeksi sarana kebencanaan							20	lokasi				5			5		38				48		
			Jumlah Kawasan rawan bencana yang dipantau							45	Kawasan				12			12		12		9		45		
			patroli karhuta							15	kali				-			-		15				15		
1 05 03 2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	persen	784,495,000	116%		911,381,950	100	persen	373,612,370	11%		85,565,080	4%	32,972,490	2%	15,560,000	1%	26,431,345	0%	8,371,080	11%	83,334,915	
1 05 03 2.03 03		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	500	laporan	4,516,500,000	200	laporan	670,604,000	12	Laporan	294,672,500	50	Orang	80,015,080	21	32,972,490	6	15,560,000	15	22,679,545	8	8,371,080	50	79,583,115	
1 05 03 2.03 04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	orang	3,205,000,000	200	orang	240,777,950	80	Orang	78,939,870	80	Orang	5,550,000					80	3,751,800			80	3,751,800	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam rencana strategis belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditentukan. Namun secara kinerja telah tercapai sesuai perjanjian kinerja tahunan yang ditargetkan, Pencapaian tersebut diperoleh atas usaha dan kerjasama para pemangku kepentingan.

Adapun indikator kinerja yang dilaksanakan yaitu:

1. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, indikator tersebut dapat tercapai 100% dari target renstra 100%. Hal ini dapat dicapai dengan metode sosialisai melalui tatap muka, dan media sosial.
2. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, indikator tersebut tidak dapat dicapai dari target renstra 100% dan hanya mampu dicapai 8.20 %. Namun angka ini naik dibanding tahun sebelumnya. Angka capaian ini diperoleh dari data pelatihan yang dilaksanakn secara internal BPBD namun belum adanya data-data pelatihan eksternal yang dilaksanakan stekholder lain sebagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
3. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pada indikator ini tercapai 100% dari target yang ditentukan dengan jumlah angka keberhasilan penanganan layanan evakuasi korban bencana.

Hasil capaian kinerja yang dilakukan dengan berpedoman pada dokumen rencana strategis disajikan pada tabel berikut:



Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Tahun 2023

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	Indek Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	1.14 %	8.20%	100 %	100 %	



3	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
---	--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama pada BPBD Kota Bontang yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Untuk mencapai kinerja tersebut perlu adanya strategi pencapaiannya dalam hal memaksimalkan anggaran yang ada maupaun dengan kerjasam pihak external dalam kerangka penta helix.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Beberapa hal yang menjadi akar masalah bagi BPBD Kota Bontang dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Jawa Tengah adalah:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - Belum optimalnya sinergitas dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana;
 - Masih terbatasnya regulasi dan forum-forum terkait kebencanaan;
 - Kurangnya antusiasme dan kesadaran OPD terkait dalam melengkapi data pendukung IKD (Indeks Ketahanan Daerah);



- Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam Pengurangan Resiko Bencana;
 - Tingkat pemahaman relawan dalam hal kebencanaan masih rendah;
 - Belum optimalnya penyebarluasan informasi, pemantauan dan pelatihan dalam penanggulangan bencana;
 - Sosialisasi mitigasi bencana alam dan sosial belum tersebar merata di daerah rawan bencana;
 - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik:
- Terbatasnya jumlah personil yang menangani kebencanaan khususnya anggota BPBD;
 - Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang alat-alat rescue;
 - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam menganalisa kebutuhan logistik terutama ketika terjadi bencana;
 - Belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) tingkat Kota.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
- Belum adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terakomodir didalam rencana strategis BPBD;
 - Belum terbentuknya Tim JITUPASNA tingkat Kota;
 - Masih minimnya regulasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2.3.3 Tantangan

Banyaknya potensi bencana di Kota Bontang perlu disikapi dengan meningkatkan kesiapsiagaan aparatur yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk



kesiapan Pemerintah Kota Bontang dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB pada semua jenis bencana dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan PB. Selain Dokumen RPB komponen-komponen lain dalam penanggulangan bencana yang perlu disusun seperti halnya membuat dokumen rencana kontigensi, melaksanakan gladi kesiapsiagaan dan pengaktifan forum-forum amupun relawan-relawan dalam penanggulangan bencana.

Data dan informasi bencana sebagai komponen utama perlu dikelola dengan baik sebagai dasar penanggulangan bencana agar tercapai dengan optimal dan terarah dan tepat sasaran. Pembentukan pusat informasi bencana BPBD Kota Bontang diharapkan dapat terbentuk guna mendukung tersedianya data dan informasi bencana sekaligus bisa menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya.

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan dalam kerangka pentahelix harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kota Bontang, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kota Bontang dalam rangka mengurangi risiko risiko tersebut melalui program-program kegiatan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kota Bontang dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kota Bontang adalah:

- a. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- b. Tingkat potensi bencana di Kota Bontang sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial.
- c. Kota Bontang yang berada di hilir DAS yang rawan terhadap bencana banjir yang disebabkan rusaknya daya dukung lahan di hulu sungai yang menjadi kewenangan wilayah lain, seperti aktivitas pemanfaatan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi, Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun menyebabkan semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
- d. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- e. Masih kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi SDM BPBD;
- f. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib,
- g. Partisipasi dunia usaha melalui alokasi anggaran CSR masih belum dikelola dengan baik untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra bencana.

2.3.4 Peluang

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas diantaranya:

- a. Dari segi regulasi pada tahun 2023 telah akan di susun dokumen kajian resiko bencana yang menjadi dokumen induk dalam hal penanggulangan bencana kedepannya.
- b. Meningkatnya klasifikasi tipe BPBD Kota bontang yang nantinya dapat terpenuhinya jumlah SDM yang tercukupi secara kuantitas dan kualitasnya.
- c. Sumberdaya eksternal baik perusahaan, masyarakat dan relawan yang belum secara optimal terlibat dalam penanggulangan secara menyeluruh.
- d. Dukungan dari pihak pemerintah dan perangkat daerah terkait yang dapat ditingkatkan lagi.

1.2 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengacu pada RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 dengan visi Terwujudnya Kota yang Bontang Lebih Hebat dan Beradab, penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan keempat yang mengusung tema “Penguatan Daya Saing Investasi, Pariwisata dan UMKM”. Rancangan tema pembangunan ini akan menjadi arahan kebijakan utama penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD mengacu pada misi ke 2 Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup yang bertujuan Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan dengan sasaran Mewujudkan pembangunan



perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari.

Pada tahun 2024 terdapat penambahan sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Review terhadap Rancangan Awal RKPD BPBD Kota Bontang Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	Paket Belanja	HASIL ASISTENSI
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	350,000,000	Makan Minum Sosialisasi 470 orang, Kit (Tas Jinjing 300 buah, Pelampung 80 buah, Tumbler 103 buah), Honorarium Narasumber 6 orang	350,000,000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	622,700,000	Makan Minum Forum Pengurangan Risiko Bencana 1 kali,	72,700,000



		Terhadap Bencana				Honorarium Narasumber 2 orang	
			1.05.03.2. 02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	Biaya Penyusunan Dokumen RPB	500,000,000



			1.05.03.2. 02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	293,000,000	Pembelian nozzle 2 buah, selang pemadam kebakaran 12 roll, coupling machino 9 pasang , pompa punggung 20 unit, keyyok 20 buah, sepatu pemadam 52 pasang, pocket mask 40 buah, tabung oksigen portabel 5 unit, manequen CPR 2 unit, skop stretcher/ tandu sekop 2 unit	293,000,000
			1.05.03.2. 02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	50,000,000	Apel dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana 1000 orang	100,000,000



			1.05.03.2. 02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	359,065,428	Makan Minum Pemantauan Wisata Laut , Inspeksi sarana evakuasi, Patroli Karhutla, Pemantauan Daerah Rawan Bencana,	153,665,394
			1.05.03.2. 02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	Rakortek PK, Latihan Bersama TRC, Sertifikasi TRC	871,796,250
			1.05.03.2. 02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	193,000,000	Pengadaan Smart TV 1 unit, HP Satelit 1 unit, extra mik 2 unit, radio rik 1 unit, GPS 1 unit , Rakor Pusdalops	193,000,000



			1.05.03.2. 02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	800,000,000	Makan Minum 663 orang , Honorarium Narasumber 5 orang	55,371,000
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2. 03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	329,000,000		-
			1.05.03.2. 03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	-	Makan Minum Rapat 250 orang, Cetak Dokumen 5 Buku,	100,000,000
			1.05.03.2. 03.0008	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan	-	Pelatihan Tim SAR	229,000,000



				keadaan darurat Kabupaten/Kota			
			1.05.03.2. 03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	307,500,000	Makan Minum Tim SAR , Bahan Bakar 5600 liter, Sarung Tangan Karet 300 pasang , Kacamata Google 52 pasang , Masker Respirator 52 set, Sarung tangan bintik 300 pasang	307,500,000
			1.05.03.2. 03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	560,818,835	-	-
4	PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulan n Bencana	1.05.03.2. 03.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	-	paket meeting, honor dan akomodasi narasumber, makan minum peserta tim jitupasna dalam kota	300,000,000



			1.05.03.2. 04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	makan minum, SPPD	60,000,000
			1.05.03.2. 04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	makan minum suveyor,	40.000.000
			1.05.03.2. 04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	barang-barang Rutena	243,719,333
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.05.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	dokumen Renja, DPA, Sakip 3 rangkap	4,541,823



	KABUPATEN/ KOTA	Perangkat Daerah					
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,126,062,920	18 pns, 30 pppk	8,126,062,920
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	293,881,165	sepatu pdh 52 org	31,587,244



8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	9,456,610	alat2 listrik	9,333,718
			1.05.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,930,000	ATK, AC 2 pk 1 unit dan 1 pk 2 unit, lampu emergency ruangan 3 unit, printer 4, pc 2	127,175,315
			1.05.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	226,270,000	makmin pos, ramadan, perabot kantor	153,196,853
			1.05.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101,422,200	kertas dan cetak	101,994,839



			1.05.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394,907,700	makmin rapat2 dan sppd	535,817,000
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	66,550,000	rak arsip 2 dan meja kerja kabid, kursi tunggu pos	40,093,169
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	materai	5,000,000



			1.05.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146,400,000	listrik air telpon internet	148,090,000
			1.05.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271,823,384	tkd 4 org jasa kebersihan 1 org retribusi sampah	271,823,384
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	837,072,300	pemeliharaan kendaraanan peralatan , bbm	837,072,300
				Pemeliharaan Gedung Kantor		pemeliharaan rutin gedung kantor	12,100,000



		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		pembuatan pagar depan, perencanaan, pengawasan	115,220,000
TOTAL					14,388,860,542		14,388,860,542



2.2. Penelahaan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bontang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan telah dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan telah ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi melalui hasil Reses DPRD. Berdasarkan data Rancangan RKPD Kota Bontang sesuai data usulan Program/ Kegiatan dari masyarakat, tidak terdapat usulan untuk Kegiatan Penyelenggaraan PB.

Tabel.. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi acuan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.1.1 Visi Penanggulangan Bencana

Menyongsong satu abad Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mencanangkan Visi Indonesia 2045 yakni "Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur" untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia 2045 ini merupakan upaya antisipatif bangsa dalam menghadapi perubahan dunia, yang salah satunya meliputi perubahan kondisi bumi dengan berbagai konsekuensi seriusnya bagi keselamatan bangsa.

3.1.2 Misi Penanggulangan Bencana

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

Tujuan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 akan dicapai pada akhir tahun 2044 melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

3.1.4 Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

3.1.5 Strategi Penanggulangan Bencana

Strategi penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, dilakukan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
 - b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
2. Kebijakan peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dilakukan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
 - b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
3. Kebijakan penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan, dilakukan dengan strategi:



- a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
 - b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
 - c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
4. Kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, dilakukan dengan strategi:
- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.
 - b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
 - c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
 - d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
 - e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
 - f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
 - g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dilakukan dengan strategi:
- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.



- b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
 - d. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
6. Kebijakan percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dilakukan dengan strategi:
- a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.
 - b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
 - c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
 - d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup

Merujuk pada Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana yakni meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang serta kebijakan dan strategi berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Bontang selaku pengemban urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan sub urusan penanggulangan bencana. Hal ini selaras dengan RKPD Kota Bontang tahun 2025 dengan tema Penguatan Daya Saing Investasi, Pariwisata dan UMKM Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Serta Lingkungan Hidup pada yang akan dicapai melalui misi ke 2 (dua), Kota Bontang yang Berkelanjutan yang Layak Huni, Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan Melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Infrastruktur Serta Pelestarian Lingkungan Hidup dengan tujuan mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan



berwawasan lingkungan, yang memiliki sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian (pra bencana), saat terjadi bencana (tanggap darurat) maupun pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang telah menetapkan tujuan organisasi yaitu : “Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh”

Yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan dampak (korban) akibat terjadinya bencana. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang 5 (lima) tahun kedepan yaitu : **“Terwujudnya responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana”**.



3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

Program yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan – kegiatan dan sub kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Kegiatan Tahun 2024 sebagai berikiut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 - 3) Pengadaan Pakaian Batik Nasional
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
9. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota
 - 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 3) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 4) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 5) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 6) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota
 - 2) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
11. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 1) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota.



- 2) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
- 3) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota



BAB IV

RINGKASAN PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Tahun 2025, alokasi APBD pada BPBD Kota Bontang adalah sebesar Rp 14,388,860,542.00,- (empat belas milyar tiga ratus delapan pul delapan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari 2 Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Ringkasan program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif anggaran tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan target, sasaran, input, output, hasil yang akan dicapai telah tergambar dengan jelas dan terukur serta penanggung jawab dan pelaksana kegiatan tersebut



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							15.767.943.513,00							14.245.873.897,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.767.943.513,00							14.245.873.897,00		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						15.767.943.513,00							14.245.873.897,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	12.116.261.773,00						-	8.966.176.321,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	-			100 persen	4.733.055,00				5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan pelayanan prima tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	135.429.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.733.055,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan pelayanan prima tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		135.429.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	



Rencana Kerja BPBD Kota Bontang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	7.945.145.891,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	4.114.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	7.945.145.891,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		4.114.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	-			100 persen	1.108.287.589,00				6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	678.324.691,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														



Rencana Kerja BPBD Kota Bontang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	9.896.068,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		10.402.271,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	127.132.249,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		43.923.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	148.122.090,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		248.897.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	106.107.182,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		111.564.420,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														



Rencana Kerja BPBD Kota Bontang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	717.230.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		263.538.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah</i>	-			100 persen	1.539.700.214,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.548.225.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	660.917.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		660.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	698.528.046,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														



Rencana Kerja BPBD Kota Bontang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				6 Unit	39.895.168,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		73.205.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	139.960.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		115.020.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran</i>	-			100 persen	471.042.820,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.334.966.380,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		7.466.910,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														



Rencana Kerja BPBD Kota Bontang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	188.890.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelesaian urusan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		170.860.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	277.152.820,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelesaian urusan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.156.639.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 persen	1.047.352.204,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelesaian urusan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.158.434.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				54 Unit	984.462.204,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.093.434.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	62.890.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan</i>	-			100 persen	3.651.681.740,00						-	5.276.494.576,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-			100 persen	210.361.262,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	67.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				380 Orang	210.361.262,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		67.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Rencana Kerja BPBD Kota Bontang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DAMA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			15 persen	2.529.224.300,00			Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	3.221.475.243,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	73.486.330,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		903.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	350.660.786,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		366.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				150 Orang	384.413.047,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		36.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA DPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJU DPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan status kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				10 Kawasan	175.860.608,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemertapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		872.925.243,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				52 Orang	804.544.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyediaan sarana tata kelola pemerintahan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0025	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKSTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	153.927.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		366.300.000,00	SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPS) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	546.591.729,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		900.000.000,00	SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														



Rencana Kerja BPBD Kota Bontang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				15 Kawasan	37.740.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		175.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-			100 persen	576.970.328,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkebunan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.344.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang Bertasif Ditemukakan, Dibolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	265.648.073,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.344.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0007		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				5 Dokumen	23.051.255,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0008		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				51 Orang	288.271.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kelidugan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelesaian tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tingkat layanan pemenuhan sistem dasar penanggulangan bencana	-			100 persen	335.125.850,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelesaian tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	643.719.333,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				3 Dokumen	48.350.850,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelesaian tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				8 Dokumen	20.670.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelesaian tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		243.719.333,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	266.105.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
J U M L A H								15.767.943.513,00						14.245.873.897,00		



BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini dibuat sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan tersusunnya rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2025 diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat dikerjakan menjadi lebih terarah dan sistematis.

Kami sadar bahwa Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini jauh dari sempurna, namun inilah yang dapat kami susun sebagai bahan kebijakan Pemerintah dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyelenggara penanggulangan bencana. Selanjutnya kami mohon saran dan pendapat dari semua pihak sehingga kami dapat memperbaiki baik dari segi pembuatan atau penyusunan renja maupun rencana kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun mendatang.

Bontang, Maret 2024

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH
KOTA BONTANG,**

H. Usman HM., ST, M.Si
Pembina
NIP. 19670615 200312 1 004